

**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PT. LONSUM DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KARET DI KECAMATAN
BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA**

ALAM HADITARTO

Nomor Stambuk : 10564 01695 12



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PT. LONSUM DALAM
PEMBERDAYAAN PETANI KARET DI KECAMATAN BULUKUMPA
KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Diusulkan dan Diajukan Oleh

ALAM HADITARTO

Nomor Stambuk : 10564 01695 12

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Pemerintah Daerah dan PT. Lonsum dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

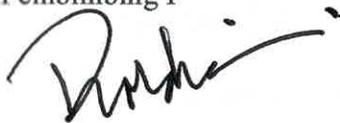
Nama Mahasiswa : Alam Haditarto

Nomor Stambuk : 10564 01695 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

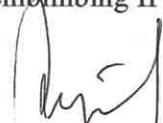
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si

Pembimbing II



Handam, S.IP, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat keputusan / undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0068/FSP/A.1-VIII/1/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program study Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu 20 Januari 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Dr. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Alam Haditarto

Nomor Stambuk : 10564 01695 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 15 Agustus 2017

Yang Menyatakan,

Alam Haditarto

ABSTRAK

ALAM HADITARTO. KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PT. LONSUM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KARET DI KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA

Pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh dan memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti terdorong untuk menjelaskan sejauh mana kerjasama Pemerintah dan PT. Lonsum terhadap pemberdayaan petani karet serta faktor yang mempengaruhi kegiatan pemberdayaan yang ada di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan kondisi objek penelitian yang diperoleh dari informan yang dipilih secara purposive (sengaja) yakni aparat pemerintah, bagian dari PT. Lonsum, lembaga petani dan masyarakat petani. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama Pemerintah dan PT. Lonsum dalam pemberdayaan petani karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sangat penting dimana Pemerintah dan PT. Lonsum memfasilitasi petani dan mengadakan suatu program pemberdayaan yang dibantu oleh penyuluh pertanian dan lembaga petani untuk meningkatkan kapasitas petani dan meningkatkan hasil tanaman karet.

Keyword : Pemberdayaan petani

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikumWr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntun manusia ke jalan yang diridai oleh Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis sadar masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan sumbang saran dan kritikan untuk menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui berbagai pihak. Baik itu dari bimbingan dosen-dosen, maupun rekan-rekan mahasiswa dan penulis mendapatkan motivasi, baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Idris, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan Wakil Dekan I, II, II, dan IV yang telah memberi wadah buat penulis.
2. Bapak Andi Luhur Prianto, S.Ip, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh

stafnya yang telah memberikan arahan dan petunjuk selama masa pendidikan.

3. Ibu Dr. Andi Rosdianti Razak, M.si. Selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan pada waktu penulis masih merampungkan skripsi. Dan Bapak Handam, S.Ip, M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan sabarnya dan tidak bosan-bosannya membantu penulis saat konsultasi.
4. Segenap Dosen, Staf Jurusan, Tata Usaha Jurusan Ilmu Pemerintahan tak lupa penulis haturkan banyak terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, motivasi, serta nasehatnya selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ir. Osten Panjaitan selaku pimpinan dan seluruh staf PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk Balombessie Estate di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumbayang telah memberikan arahan dan motivasi selama penelitian berlangsung.
6. Ucapan teristimewa untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Sadaruddin dan Ibunda tercinta Salwiah Sauf yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan serta senantiasa mengiringi penulis dengan doa suci, dan mengorbankan segalanya demi kepentingan penulis dalam menuntut ilmu. Dan saudara-saudaraku Wiranto Hadi, Isra Nur Hidayat, Al Qahfi. Serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan penulis motivasi dan doa yang ikhlas.

Akhir kata, besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini menjadi berguna bagi kita semua dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 05 September 2017

Penyusun

Alam Haditarto

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan Tim	iii
Abstrak	iv
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian, Konsep dan Teori	7
1. Kerjasama Pemerintah	7
2. Pemerintah Daerah.....	12
3. Pemberdayaan Masyarakat	19
4. Tanaman karet	24
B. Kerangka Pikir Penelitian	26
C. Fokus dan Deskripsi Penelitian	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data	35
G. Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Keadaan Wilayah.....	37
B. Gambaran Umum PT Lonsum Perkebunan Balombessie.....	41
C. Kerjasama Pemerintah Daerah dan PT Lonsum dalam Pemberdayaan Petani Karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.....	54
1. Indikator Kerjasam Pemerintah Daerah dan PT Lonsum dalam Pemberdayaan Petani	54
2. Pemberdayaan Petani Karet	62
D. Faktor Pemberdayaan	65
1. Faktor Pendorong.....	65
2. Faktor Penghambat	66
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara agraris atau pertanian. Dimana Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor-sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Permasalahannya adalah berapa besar dampak perbaikan terhadap petani dalam posisinya sebagai petani dalam perubahan sosial.

Di Negara-negara berkembang khususnya Indonesia pembangunan pertanian tidak sesederhana yang diduga. Permasalahan yang paling krusial adalah bahwa pasar dan politik sama-sama meminggirkan (*under-value*) sektor pertanian dan sektor-sektor lain dengan basis sumber daya alam (*resources-based*) kebijakan ekonomi dan strategi merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan menguasai hajat hidup sebagian besar penduduk, menyerap lebih separuh total tenaga kerja dan bahkan menjadi katub pengaman pada krisis ekonomi Indonesia (Arifin, 2004).

Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu

menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Ditengah ancaman menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia akibat krisis keuangan, perekonomian Indonesia juga akan mendapat tekanan yang cukup berat. Penurunan pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kinerja ekspor komoditas, tetapi dengan pangsa yang cukup besar dan adanya ekspektasi perbaikan perekonomian dunia ke depan, ekspor komoditas masih tetap menjadi tumpuan perekonomian dalam jangka panjang. Salah satu komoditas yang selama ini menjadi andalan ekspor adalah karet yang tetap menjadi primadona ekspor.

Karet (termasuk karet alam) merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia sehari-hari, hal ini terkait dengan mobilitas manusia dan barang yang memerlukan komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendaraan, conveyor belt, sabuk transmisi, dock fender, sepatu dan sandal karet. Kebutuhan karet alam maupun karet sintetik terus meningkat sejalan dengan meningkatnya standar hidup manusia. Kebutuhan karet sintetik relative lebih mudah dipenuhi karena sumber bahan baku relatif tersedia walaupun harganya mahal, akan tetapi karet alam dikonsumsi sebagai bahan baku industri tetapi diproduksi sebagai komoditi perkebunan.

Indonesia sebagai produsen karet nomor satu di dunia akhir-akhir ini terdesak oleh dua Negara tetangga : Malaysia dan Thailand. Peranan karet dan barang karet terhadap ekspor nasional tidak dapat dianggap kecil mengingat Indonesia merupakan produsen karet urutan ke-2 terbesar di dunia dengan produksi sebesar 2,55 juta ton

pada tahun 2007 setelah Thailand (produksi sebesar 2,97 juta ton) dan negara yang memiliki luas lahan karet terbesar di dunia dengan luas lahan mencapai 3,4 juta hektar di tahun 2007.

Luas lahan karet di Indonesia yang dimiliki Indonesia pada tahun 2010 mencapai 2,7 sampai 3,4 juta hektar. Ini merupakan lahan karet yang terluas di dunia. Sayangnya perkebunan karet yang luas tidak diimbangi dengan produktivitas yang memuaskan. Produktivitas lahan karet di Indonesia rata-rata rendah dan mutu karet yang dihasilkan juga kurang memuaskan. Bahkan di pasaran internasional karet Indonesia terkenal sebagai karet bermutu rendah .

Ada tiga jenis perkebunan karet yang ada di Indonesia yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Dari ketiga jenis perkebunan tersebut, PR mendominasi luas lahan yang mencapai 2,84 juta hektar atau sekitar 85% dari lahan perkebunan karet. Bila dilihat pada tahun 2007, luas perkebunan rakyat mencapai 2899,7 ribu hektar sedangkan luas perkebunan besar hanya 514 ribu hektar.

Bulukumba merupakan penghasil karet di Sulawesi selatan dengan produksi karet pada tahun 2010 sebanyak 7.343 ton yang terdiri dari produksi pertanian rakyat 1.250 ton dan produksi pertanian swasta 6.093 ton. Yang tersebar di 19.900 ha, dimana luas lahan pertanian karet terdiri dari perkebunan rakyat 14.105 ha dan perkebunan swasta 5.975 ha.

Dalam gambaran diatas dapat dijelaskan bahwa pertanian karet rakyat dengan luas lahan 19.900 ha memproduksi karet lebih kecil dengan 1.250 ton sedangkan

pertanian karet swasta yang memiliki lahan yang lebih sedikit yaitu 5.975 ha tetapi dapat memproduksi karet yang lebih besar dengan 6.093 ton. Maka terlihat masalah besar yang dihadapi oleh pertanian karet rakyat dalam hal pengelolaan pertanian.

Perkebunan karet rakyat di Kab. Bulukumba sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Umumnya diusahakan oleh petani dalam skala kecil (sempit) dengan sistem tradisional. Berbeda dengan yang diusahakan oleh perusahaan pemerintah/swasta, dimana pengusahaannya dilakukan dalam skala besar dengan sistem teknologi modern. Namun demikian, dilihat dari proporsi luasan, kebun karet rakyat tetap mendominasi, sehingga usaha itu patut diperhitungkan, karena dapat menentukan dinamika perkaretan Indonesia.

Walaupun pengembangan pertanian karet mengalami prospek yang cerah, namun masih ditemukan beberapa masalah dalam proses pengelolaannya oleh petani. Keberhasilan dari pada usaha perkebunan karet sangat ditentukan oleh kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh petani dalam mengelolah pertanian yang diusahakannya. Pengelolaan usaha tani karet secara tepat dapat memberikan hasil produksi yang tinggi dan tingkat keuntungan yang memadai. Misalnya bagaimana petani menentukan sikap mereka dalam penanganan usaha tani karet mereka, penggunaan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan secara tepat waktu, jenis dan dosis, pemeliharaan secara intensif, perlakuan pasca panen yang baik dan kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut upaya petani dalam mengelolah usaha tani yang diusahakannya.

Berdasarkan keseluruhan masalah diatas maka saya tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul kerja sama pemerintah daerah dengan PT. London Sumatra. Tbk dalam pemberdayaan masyarakat petani karet di Kabupaten Bulukumba serta faktor yang menjadi penghambat dan pendorong kegiatan pemberdayaan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka pokok masalah yang perlu di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kerja sama pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dan PT. Lonsum dalam pemberdayaan petani karet di Kecamatan Bulukumba?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam kegiatan pemberdayaan petani karet di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kerjasama pemerintah dan PT. Lonsum dalam pemberdayaan petani karet di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba.
2. Mengetahui faktor-faktor pemberdayaan.

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang berminat untuk membuat program dan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan petani.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan petani.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Kerjasama Pemerintah

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan (*cara. Hal urusan dan sebagainya*) memerintah secara etimologis, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus atau cara. Hal kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan yang di kehendaki.

Kerjasama pemerintah di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dalam upaya kesejahteraan masyarakat khususnya petani karet yaitu melakukan pemberdayaan kepada petani karet. Dimana kerjasama pemerintah ini sangat berpengaruh dalam tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibantu oleh motivasi petani itu sendiri. Ada beberapa indikator-indikator kerjasama Berdasarkan pengertian kerja sama yang dinyatakan Davis (dalam Dewi, 2006) indikator-indikator kerja sama adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerja sama yang baik.

2. Saling berkontribusi, yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerja sama.
3. Pengerahan kemampuan secara maksimal, yaitu dengan mengerahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerja sama akan lebih kuat dan berkualitas.

Indikator kerjasama pemerintah dengan PT. Lonsum dalam pemberdayaan petani karet yaitu memberi kebijakan, pengetahuan, pelayanan, sikap, dan motivasi. Dimana pemerintah dan PT. Lonsum sebagai fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan seperti menyediakan tenaga penyuluh pertanian, sarana dan prasarana kegiatan pemberdayaan.

Istilah pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Disebut sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material maupun formal, sifatnya universal, sistematis serta spesifik dan dikatakan sebagai seni, karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan.

Dalam kata “perintah” tersebut ada 2 pihak yang terkandung dan saling memiliki hubungan, yaitu pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Jika kata ilmu dirangkaikan dengan kata “pemerintahan” menjadi “ilmu pemerintahan”

Berkenan dengan ilmu pemerintahan tersebut, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan pengurusan (*eksekutif*), kepengurusan (*legislatif*) kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pusat

dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya, dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara benar (Inu Kencana syafiie, 2011).

Arah pemberdayaan masyarakat secara umum berpangkal pada dua sasaran utama yaitu, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk sampai kepada sasaran tersebut, maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat. Partisipatori diartikan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat. Sedangkan emansipatori diartikan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan demikian peran serta dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat sangat diperlukan.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan yang diutarakan oleh Ryaas Rasyid. Ryaas membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreaifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi didasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan. Ndraha menyebutkan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan, dan fungsi sekunder atau pemberdayaan.

Fungsi primer secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari rowing (pengaturan) ke steering (pengendalian). Fungsi sekunder atau pemberdayaan secara perlahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk secara terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, pemberdayaan mampu mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Seiring dengan itu, hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan

pemerintah, serta dengan keterbatasan yang dimilikinya, maka secara perlahan masyarakat mampu untuk hidup mandiri mencukupi kebutuhannya.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

2. Pemerintah Daerah

Dalam bahasa Inggris pengertian pemerintah disebut *Government*. Pengertian Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya mencapai tujuan negara.

Menurut Kansil (2008) Pemerintah Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pasal 18 UUD 1945 juga menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam

lingkungannya yang juga berbentuk negara. Daerah Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah kesatuan yang lebih kecil. daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif. Menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Daerah-daerah yang bersifat otonom yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.

Membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas perbantuan.

1. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.

3. Asas Tugas Perbantuan

Asas tugas perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kabupaten menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Jelas bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi. Wilayah administrasi adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.

Syarat-syarat dibentuknya suatu daerah, antara lain :

- a. Mampu membiayai kehidupannya (kemampuan ekonomi)

- b. Jumlah penduduk yang ditentukan
- c. Luas daerah
- d. Memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional
- e. Pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa
- f. Dapat melaksanakan pembangunan untuk daerahnya

Menurut Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah ialah kepala daerah, yaitu Kepala Daerah pada umumnya, seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta DPRD. Kedudukan Kepala Daerah sama tinggi. Kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak dibidang legislatif. Meskipun demikian, harus diakui bahwa pembuatan peraturan daerah tidak dapat dilakukan oleh DPRD sendiri, tetapi bersama-sama dengan Kepala Daerah dan DPRD.

Mengingat luasnya tugas yang dihadapi oleh kepala daerah, perlu diadakan wakil kepala daerah. Akan tetapi, karena kondisi daerah berbeda-beda, pengisian jabatan wakil kepala daerah diadakan menurut kebutuhan. Tugas utama kepala daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintah daerah.

Pemerintah daerah merupakan pembagian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya. Kekuasaan ini diberikan oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat dikontrol dengan mudah oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada pemerintah pusat terhadap daerah yang

diurus dan diaturnya. Ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat ini diatur di dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang Pemerintah No.23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa efisiensi dan efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tujuan Pemerintah Daerah adalah memungkinkan daerah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan untuk kemajuan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Inti dari pelaksanaan pemerintah daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Pemerintah Daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi dilapisan bawah, tetapi juga mendorong aktivitas masyarakat untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungannya. Pelaksanaan pemerintah daerah kelihatannya memang sederhana, namun sebenarnya mengandung pengertian yang cukup rumit, karena didalamnya tersimpul makna pendemokrasian dalam arti pendewasaan politik rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat dan sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat yang berkeadilan.

Ada banyak masalah yang mempengaruhi pelaksanaan pemerintah daerah, namun sumber daya manusia yang merupakan masalah yang sangat mendasar karena dengan ditetapkannya status sebagai daerah yang luas disertai kadar desentralisasi yang tinggi, memungkinkan setiap daerah mengembangkan kreasi dan inovasi yang tinggi dalam mengurus rumah tangganya. Dalam format seperti ini, kebutuhan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi dasar pertimbangan utama yang memerlukan langkah-langkah prioritas yang terprogram secara sistematis. Faktor manusia merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini didasari karena manusialah yang menjalankan mekanisme pemerintahan. Diantara sumber daya manusia yang secara potensial

sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintah daerah adalah aparatur pemerintah daerah.

Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah yang bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut meningkatkan dayaguna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah seperti pajak-pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain yang sah.

Berikut ini ada berbagai cara diadakannya desentralisasi pemerintahan, yaitu sebagai berikut (Syafiie 2011: 58) : (1) Meringankan beban, karena aparat pemerintah pusat tidak perlu lagi jauh-jauh ke daerah dimana aparat daerah sudah difungsikan dengan baik. (2) Generalistik berkembang, karena seluruh lapisan masyarakat dengan segala macam kemampuannya dikembangkan. (3) Semangat kerja ada karena setiap individu terpakai dan diakui keberadaannya. (4) Siap pakai, karena tenaga-tenaga yang akan dipakai sudah berada didaerahnya masing-masing. Jadi dalam sistem kepegawaian tidak diperlukan lagi pemindahan status kepegawaian. (5) Efisiensi, karena dalam penghematan waktu pemerintah tidak terlalu lama mengisi formasi yang kosong. (6) Manfaat yang diperoleh besar, karena batin masyarakat terpenuhi melalui pedomokrasian di daerah ini. (7) Resiko tinggi, karena masalah-masalah yang timbul di daerah bukan hanya dipikirkan dan dipecahkan oleh aparat pusat, tetapi juga dipikirkan penanggulannya oleh masyarakat daerah. (8) Tepat untuk

penduduk yang beraneka ragam. (9) Memudahkan pekerjaan karena pekerjaan dapat dibagi-bagi antara pusat dan daerah dan antara daerah dengan daerah lain. (10) Unsur individu menonjol pengaruhnya, karena setiap individu yang memiliki keahlian di daerahnya, akan segera terlihat. (11) Menciptakan administrasi yang relative lebih fleksibel, inovatif dan kreatif karena dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut, muncul kreasi, keinginan untuk maju, berkembang, serta luwes dalam menyelesaikan permasalahan ke daerahan. (12) Kesewenangan berkurang, karena pemerintah pusat telah memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, maka ketergantungan daerah kepada pusat berkurang.

Kebutuhan untuk memanfaatkan institusi daerah pada dasarnya disebabkan oleh adanya variasi dalam hal kepadatan penduduk, intensitas kebutuhan, dan minimnya sumber daya yang tersedia pada masyarakat. Kepentingan potensial pemerintah daerah telah meningkat sejalan dengan tuntutan yang semakin besar terhadap pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan. Disamping itu, walaupun fenomena diatas mempengaruhi semua pemerintah daerah, tuntutan pelayanan bagi yang ada di wilayah perkotaan makin tinggi. Semakin besar hambatannya, semakin tidak dapat dihindarkan masalah kriminalitas, pemungkiman kumuh, jalanan yang bersesakan, persediaan air yang tidak mencukupi, fasilitas kebersihan yang terbatas, persekolahan yang tidak memuaskan dan pengangguran.

Perbedaan dalam kondisi daerah, kebutuhan daerah, sumber daya daerah, aspirasi daerah, dan bahkan prioritas daerah menuntut perlunya diciptakan alat

transpormasi kebijaksanaan nasional yang efektif ke dalam program daerah secara responsive dan bertanggung jawab.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah pemberian kesempatan kerja kepada kelompok untuk merencanakan kemudian melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri (Danardi, 2000).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan (Mubyarto, 2000).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, setiap program pemberdayaan yang di laksanakan mampu memberikan manfaat baik bagi target grup, maupun masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya setiap program pemberdayaan dapt di pengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berasal dari kelompok masyarakat itu sendiri atau dari luar.

Pembedayaan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang luas bagi penduduk yang dikategorikan dalam kemiskinan untuk melakukan kegiatan social ekonomi yang produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan yang pendapatan yang lebih

besar (Aderson,1989). Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar serti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Soetomo, 2013).

Pemberdayaan masyarakat, biasanya dibuat di tingkat Pusat dan dilaksanakan oleh Instansi Propinsi dan Kabupaten. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut tidak diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan dan menganggap masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan

merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Dalam pandangan ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar. Bantuan yang diberikan lebih banyak menciptakan ketergantungan yang pada gilirannya akan lebih menyusahkan masyarakat dari pada menolongnya, karena bantuan tersebut kadang-kadang tidak sesuai kebutuhan dan prioritas yang diinginkan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat saat ini memosisikan masyarakat sebagai pelaku utama, sehingga masyarakat itu sendiri yang menentukan kebutuhan dan prioritas yang diinginkannya. Sasaran utama dari pemberdayaan masyarakat adalah membuka akses bagi kaum yang terpinggirkan dalam pembangunan, termasuk kaum perempuan dan golongan tidak berdaya lainnya. Untuk itu pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang berjalan secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang dihadapi (Sukino, 2013).

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik ditingkat ideologis maupun praktis. Ditingkat ideologis, konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep, *top down* dan *bottom up*.

Antara *frowth strategy* dan *people centered strategy*, Sedangkan ditingkat praktis terjadi lewat otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, dan pembelajaran social melalui pengalaman langsung (Pranaka,1996).

Secara konseptual, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Ada tiga hal yang harus di perhatikan untuk memperdayakan masyarakat tani yaitu: Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat tani harus demokrasi, mengembangkan sistem partisipasi, dan memberikan otonomi yang lebih luas terhadap masyarakat tani untuk membangun desanya.

1. Pemberdayaan yang demokrasi

Pembangunan akan berjalan baik apabila di tumbuhkan adanya demokrasi yang subur. Demokrasi dalam masyarakat lebih banyak dikenal dengan istilah musyawarah, artinya bahwa pembangunan tersebut dapat di putuskan oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan dibutuhkan dan keinginannya. Demokrasi menurut Prof. Sarbini (2004) adalah kedaulatan rakyat. Pemerintah/penguasa hanya melaksanakan dan menyelenggarakan.karena itu harus ada pengawasan rakyat (*social control*). Maka dalam demokrasi harus berlaku *Trias Politica*, yaitu adanya kebebasan dan kedaulatan penuh dari masing masing lembaga. Demokrasi yang murni dan sejati harus menjamin kebebasan serta terbukanya kesempatan untuk ikut serta dalam segala persoalan masyarakat.

2. Pemberdayaan Partisipatif

Pemberdayaan yang partisipatif artinya pemberdayaan merupakan kepentingan masyarakat yang di landasi konsep bahwa pembangunan itu dari masyarakat petani, oleh masyarakat petani dan untuk masyarakat petani.

Menurut Prof. Dr. Suhartono dkk, ada dua syarat agar demokrasi tidak menjadi semu atau artificial yaitu: Syarat dasar pertama, syarat internal bagi kalangan masyarakat. Demokrasi hanya mungkin bisa secara wajar dan benar, bila rakyat berada dalam kesadaran politik yang mandiri (tidak terhegemoni) dan memiliki kemampuan untuk mengaktualisasi aspirasinya. Kesadaran politik di butuhkan agar rakyat bisa terbebas dari belenggu dan sekat hegemoni yang di kembangkan oleh penguasa. Kedua syarat eksternal, berupa adanya kondisi yang mendukung posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kondisi eksternal yang di maksud adalah Suatu kondisi yang memberikan jaminan penuh pada rakyat, sehingga tersedia rasa aman bagi rakyat dengan demikian diperlukan adanya pengakuan atas hak-hak dasar rakyat, dan suatu wahana atau badan-badan formal yang dapat menjadi saluran aspirasi rakyat. Tanpa syarat tersebut proses demokrasi, dapat di pandang sebagai aktualisasi dari demokrasi semu.

3. Memberikan otonomi yang seluas-luasnya

Pemberian otonomi sangat penting untuk memberdayakan masyarakat tani, artinya bahwa keputusan pembangunan merupakan hal dan wewenang masyarakat tani. Campur tangan pemerintah dalam ini tidak boleh mencampuri urusan yang lebih

dalam, apalagi masuk di dalamnya. Namun juga tidak boleh terlalu jauh terhadap masyarakat sehingga kemandirian masyarakat dapat di perkokoh.

4. Tanaman karet

Tanaman karet berasal dari bahasa latin yaitu *Havea brasiliensis* dan berasal dari negara Brazil. Tanaman ini merupakan sumber utama bahan tanaman karet alam dunia. Jauh sebelum tanaman karet ini dibudidayakan, penduduk asli diberbagai tempat seperti: Amerika Serikat, Asia dan Afrika Selatan menggunakan pohon lain yang juga menghasilkan getah. Getah yang mirip lateks juga dapat diperoleh dari tanaman *Castillaelastica* (family moraceae). Sekarang tanaman tersebut kurang dimanfaatkan lagi getahnya karena tanaman karet telah dikenal secara luas dan banyak dibudidayakan. Sebagai penghasil lateks tanaman karet dapat dikatakan satu-satunya tanaman yang dikedunkan secara besar-besaran (Nazarudin dkk, 1992).

Pohon karet para pertama kali hanya tumbuh di Amerika Selatan, namun setelah percobaan berkali-kali oleh Henry Wickham, pohon ini berhasil dikembangkan di Asia Tenggara, di mana sekarang ini tanaman ini banyak dikembangkan; sekarang Asia merupakan sumber karet alami.

Tahun 1864 untuk pertama kalinya tanaman karet diperkenalkan di Indonesia yang pada waktu itu masih jajahan belanda. Mula-mula karet ditanam di kebun raya bogor sebagai tanaman koleksi. Dari tanaman koleksi, karet selanjutnya dikembangkan ke beberapa daerah sebagai tanaman perkebunan komersil. Daerah yang pertama kali digunakan sebagai tempat uji coba penanaman karet adalah

Pamanukan dan Ciasem, Jawa Barat. Jenis yang pertama kali diujicobakan di kedua daerah tersebut adalah species *Ficus elastica* atau karet rembung. Jenis karet *Havea brasiliensis* baru ditanam di Sumatera bagian timur pada tahun 1902 dan di Jawa pada tahun 1906.

Perkebunan karet rakyat di Indonesia juga berkembang seiring dengan naiknya permintaan karet dunia dan kenaikan harga. Hal-hal lain yang ikut menunjang dibukanya perkebunan karet antara lain karena pemeliharaan tanaman karet relatif mudah. Pada masa itu, penduduk umumnya membudidayakan karet sambil menanam padi. Jika tanah yang diolah kurang subur, mereka pindah mencari lahan baru. Namun, mereka tetap memantau pertumbuhan karet yang telah ditanam secara berkala hingga dapat dipanen. (Setiawan dan Handoko, 2005).

B. Kerangka Pikir Penelitian

Kerjasama pemerintah adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan petani yaitu sebagai fasilitator dalam program pemberdayaan petani untuk mensejahterakan dan meningkatkan kemampuan petani.

Pemberdayaan petani adalah perbaikan kemampuan petani yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap petani.

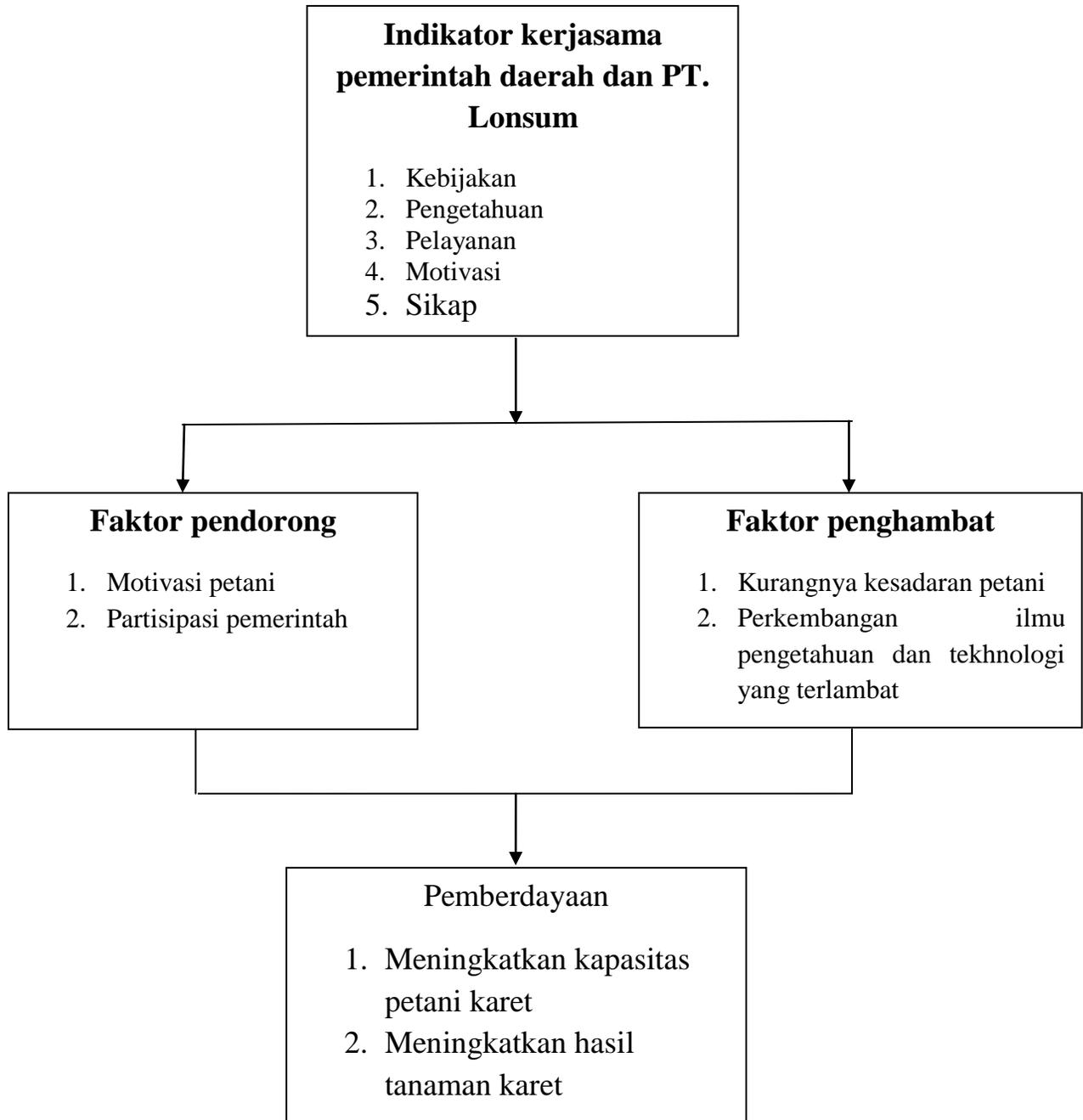
Adapun program pemberdayaan petani karet yaitu penyuluhan dan pelatihan, dimana Pembangunan pertanian ke depan diarahkan untuk memberikan peran dan partisipasi aktif masyarakat secara proporsional. Penyuluhan pertanian memiliki peran strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat, karena penyuluhan pertanian

bukan saja berperan dalam prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta, tetapi juga menumbuhkan kemandirian masyarakat yang berbasis pada pembangunan pertanian.

Pelatihan merupakan salah satu kegiatan penyuluhan dalam rangka memberdayakan masyarakat khususnya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani sebagai sasaran penyuluhan pertanian. Keberadaan petani yang memiliki sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang memadai dalam bidang pertanian, diharapkan dapat mendukung dan berperan serta dalam pembangunan pertanian. Oleh karena itu pelatihan petani perlu dilaksanakan dan dikembangkan dengan memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas dan relevansi.

Dalam implementasi program pemberdayaan ada faktor pendorong dan penghambat. Adapun faktor pendorong yaitu motivasi petani dan partisipasi pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran petani dan terlambatnya ilmu pengetahuan. Dengan strategi pemberdayaan melalui penyuluhan dan pelatihan, maka diharapkan masyarakat petani karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dapat mengembangkan pertanian karet dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai petani karet. Berdasarkan pembahasan sebelumnya adapun kerangka pikir dalam rencana penelitian yaitu:

Bagan kerangka pikir



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian kerjasama Pemerintah dengan PT. Lonsum dalam pemberdayaan petani karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

C. Fokus dan Deskripsi Penelitian

Kerjasama Pemerintah Daerah dan PT. Lonsum dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, merupakan fokus penelitian dalam pemberdayaan petani karet. Pemerintah daerah menetapkan, melaksanakan, dan memantau aturan sistem pemberdayaan masyarakat petani karet, dan menyusun rencana strategis untuk pemberdayaan masyarakat petani karet. Pemerintah daerah dan PT. Lonsum sama-sama melakukan kerjasama agar apa yang di inginkan oleh PT. Lonsum berkesinambungan dengan keinginan atau program pemerintah daerah.

Kerjasama Pemerintah daerah dan PT. Lonsum dalam pemberdayaan masyarakat petani karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, merupakan salah bukti bahwa Pemerintah daerah dan PT. Lonsum serius dalam memberdayakan masyarakat petani karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Bulukumba khususnya masyarakat petani karet yang berada di Kecamatan Bulukumpa.

Perjanjian antara Pemerintah Daerah dan PT. Lonsum dalam pemberdayaan masyarakat petani karet saling membutuhkan antara satu sama lain demi terciptanya kesejahteraan, Khususnya dalam meningkatkan hasil tanaman karet. Keterkaitan antara Pemerintah Daerah dan PT. Lonsum untuk memakmurkan Masyarakat Kabupaten Bulukumba khususnya masyarakat petani karet sangat dibutuhkan agar

hasil yang di dapat oleh petani karet dapat menunjang kehidupan perekonomian masyarakat dan menambah pemasukan daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah dan PT. Lonsum untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan–kegiatan yang spesifik dalam hal ini memberdayakan masyarakat petani karet demi terciptanya kerukunan atau hubungan baik antara Pemerintah daerah dan PT. Lonsum.

Kebijakan Pemerintah Daerah dan PT. Lonsum untuk menciptakan aturan demi tercapainya tujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan PT. Lonsum untuk kemakmuran masyarakat petani karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dengan pertimbangan bahwa dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat tani dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitas kerja petani karet PT. Lonsum di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan mulai bulan juni sampai dengan bulan juli 2017 setelah pelaksanaan seminar proposal.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dalam bentuk analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Adapun unit penelitian ini adalah organisasi atau institusi pelaksana program serta instansi terkait, tugasnya adalah kerjasama pemerintah daerah dan PT. Lonsum dalam pemberdayaan petani karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

C. Sumber Data

Semua data yang diperoleh berasal dari Pemerintah, PT. Lonsum dan petani karet yang ada di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Kerena dianggap menguasai bidang permasalahan dan berhubungan erat dengan pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam penelitian.

Jenis sumber data yang digunakan dapat dibedakan:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian. Sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau responden yang sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Adapun narasumber atau informan yang akan dipilih untuk menjadi sumber data primer adalah para petani karet yang terlihat dalam program pemberdayaan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer. Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang melengkapi serta memperjelas sumber data primer atau sumber data sekunder ini diperoleh dari data pendukung. Data sekunder yang merupakan sumber data yang melengkapi data primer adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan program pemberdayaan.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun informan kunci adalah orang yang memberikan informasi secara akurat dan mendalam sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi dan mengetahui tentang situasi dan kondisi dalam permasalahan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit dieperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data. Teknik ini dilakukan dengan jalan peneliti langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan fakta melalui pendekatan pada tiap-tiap sumber data guna memperoleh gambaran tentang kebiasaan mereka, prosedur pelayanan dan akuntabilitas.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung, dimana peneliti menggunakan teknik mengikat dan disesuaikan dengan keadaan saat itu guna mendapatkan data yang sebanyak mungkin dari informan sebagai sumber data dengan cara mencatat atau merekam hasil wawancara tersebut. Wawancara dilakukan dengan

mkasud untuk memperoleh informasi secara langsung untuk dijadikan data yang tidak diperoleh dari sumber data yang lain.

Penentuan informan didasarkan pada prediksi kemampuan informan dalam memberikan data-data yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan staf atau petugas pelayanan dan masyarakat pengguna jasa, baik dari pihak Pemerintah maupun dari pihak PT. Lonsum. Informan tersebut ditentukan sesuai dengan data yang diperlukan.

Penentuan narasumber dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara peneliti memilih orang yang tentu dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemerintah daerah, dinas yang terkait dan tokoh masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan teknik ini akan terkumpul data yang diperoleh dari nasumber tetapi terdapat pada berbagai sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen yang dikeluarkan Pemerintah, laporan-laporan dan arsip-arsip lainnya.

Dokumentasi diperlukan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian yang tidak mungkin dengan observasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan cara memilih dokumen-dokumen yang ada dan mencocokkan data dengan permasalahan penelitian.

Penentuan narasumber dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara peneliti memilih orang yang tentu dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni pihak-pihak yang terlibat.

1.	Kabid Holtikultura dan Perkebunan	: 1 orang
2.	Manager PT. Lonsum	: 1 orang
3.	Asisten manager PT. Lonsum	: 1 orang
4.	Wakil ketua SPSI PT. Lonsum	: 1 orang
5.	Petani karet PT. Lonsum	: 6 orang
	Total	: <u>10 orang</u>

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, menurut Sugiyono (2009:366), maka penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisi. Untuk memperjelas gambaran hasil penelitian maka digunakan analisis data yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksiakan dan trasporansi data kasar yang muncul dari wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bias dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan yang mengarah berdasarkan tahap pengambilan kesimpulan analisis lanjutan dari reduksi data dan sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.

G. Keabsahan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini, maka keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Pedoman wawancara, yaitu pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan wawancara langsung dengan informan.
2. Catatan lapangan, yaitu catatan yang berisi pokok informasi yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara maupun pengamatan lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Wilayah

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan. Di sebelah Utara daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, di Timur berbatasan dengan Teluk Bone, di Selatan dengan Laut Flores, dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 Km² atau sekitar 2,5% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan secara administratif, terbagi dalam 10 kecamatan, dan terbagi kedalam 27 kelurahan dan 99 Desa. pertanian adalah merupakan salah satu potensi unggulan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Bulukumba. Tanaman pangan yang potensial adalah tanaman padi dan merupakan bahan pangan utama masyarakat.

Wilayah kabupaten Bulukumba hampir 95,4 % berada pada ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan tanah umumnya 0-40⁰. terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi sawah seluas 23.365 Ha, sehingga merupakan daerah potensi pertanian. Dengan curah hujan rata-rata 230 mm per bulan dan rata-rata hujan 11 hari per bulan.

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Jazirah Sulawesi dan berjarak kurang lebih 153 km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, dan terletak antara $05^{\circ}20'$ - $05^{\circ}40'$ lintang selatan dan $119^{\circ}58'$ - $120^{\circ}28'$ bujur timur. Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di Sebelah Utara, Sebelah timur dengan Teluk Bone, Sebelah Selatan dengan Laut Flores, dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Bantaeng.

Kecamatan Bulukumpa adalah salah satu dari 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Bulukumpa berada di daerah ketinggian, sehingga daerah ini terkenal dengan hasil perkebunan dan pertaniannya.

Salah satu areal perkebunan yang cukup terkenal dan menjadi objek wisata agro di Kecamatan Bulukumpa, yaitu Perkebunan Karet Balombessie dan Perkebunan Karet Pa'langgisang.

Dengan potensi alam yang dimilikinya, maka Kecamatan Bulukumpa ditetapkan sebagai salah satu dari tiga kecamatan sentra pengembangan pertanian dan perkebunan. Dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kindang dan Kecamatan Rilau Ale (kecamatan pemekaran dari Bulukumpa).

Tabel 2. Nama Desa dan Kelurahan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan di Kecamatan Bulukumpa

No	Desa dan Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan orang/km ²
1	Sapo Bonto	3.738	10.35	361
2	Bonto Bulaeng	3.080	7.50	411
3	Bulo-Bulo	3.106	17.15	181
4	Salassae	3.033	11.00	276
5	Bontomangiring	2.045	10.00	205
6	Jojjolo	4.361	20.25	215
7	Ballasaraja	3.051	6.30	484
8	Tanete	5.188	6.33	820
9	Balangtaroang	2.701	7.50	360
10	Kambuno	2.121	7.22	294
11	Barugae	2.409	7.94	303
12	Balang Pesoang	2.300	4.31	534
13	Jawi-Jawi	3.989	12.62	316
14	Tibona	3.617	16.06	225
15	Bonto Minasa	3.669	14.27	257
16	Batulohe	2.076	7.50	277
17	Baruga Riattang	1.575	5.03	313

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Bulukumpa, merupakan salah satu dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Bulukumpa memiliki luas wilayah 171,33 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 52.059 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 304 jiwa per km². Kecamatan Bulukumpa juga meliputi 17 desa/kelurahan lainnya, yaitu Balang Pesoang, Balang Taroang, Ballasaraja, Barugae, Batulohe, Bonto Bulaeng, Bonto Minasa, Bontomangiring, Bulo-Bulo, Jawi - Jawi, Jojjolo, Kambuno, Salassae, Sapo Bonto, Tibona, Tanete, dan Baruga Riattang.

Batas wilayah Kecamatan Bulukumpa meliputi sebelah utara dengan Kabupaten Sinjai, sebelah barat dengan Kecamatan Kindang, sebelah selatan dengan Kecamatan Rilau Ale, sebelah timur dengan Kecamatan Kajang dan Ujung Loe.

Tabel 3. Tanaman Perkebunan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan Luas Areal

No	Jenis Tanaman	Luas areal
1	Karet	2.348
2	Kelapa	117
3	Kopi	742
4	Lada	208
5	Kakao	940
6	Tembakau	40
7	Pala	62
8	Cengkeh	778
9	Jambu Menté	365

Berdasarkan tabel diatas tanaman perkebunan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba memiliki luas areal 5.600 ha dengan jenis tanaman yaitu karet, kelapa, kopi, jambu mente, cengkeh, tembakau, pala, kakao, dan lada. Dari luas areal tanaman perkebunan tersebut, karet memiliki areal yang paling luas yaitu 2.348 ha.

B. Gambaran umum PT LONSUM Perkebunan Balombessie.

PT LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk. PERKEBUNAN BALOMBESSIE adalah salah satu unit kebun dari PT LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk. yang berkantor pusat di Medan, Sumatra Utara. Berlokasi di kecamatan Bulukumpa, kabupaten Bulukumpa, Sulawesi Selatan, lebih kurang 210 km arah selatan kota Makassar, Ibu kota propinsi. Berada pada ketinggian 350 m dari permukaan laut dengan curah hujan rata – rata tahunan berkisar antara 3000-4000 mm. Terdapat perbedaan musim yang jelas antara musim hujan dan kemarau. Mayoritas karyawannya adalah suku Bugis dan hanya sedikit suku Konjo atau Kajang.

Dimulai pada 1906 dengan sebuah perkebunan kecil tembakau dan kopi di Medan terus berkembang menjadi salah satu perusahaan agribisnis terkemuka, memiliki lebih kurang 100.000 hektar perkebunan kelapa sawit, karet, teh dan kakao yang tertanam di empat pulau terbesar di Indonesia. Salah satunya ada di Bulukumpa tepatnya di Kecamatan Bulukumpa.

PT LONSUM, Perkebunan Balombessie, berdiri pada tahun 1919, pada masa penjajahan Belanda, dengan keluarnya surat izin penggunaan lahan yang disebut hak Erfacht no 139, 171 dan 274 tahun 1919 dengan konsesi seluas 7.092,82. ha dengan nama NV. CELEBES LANDBOUW MAATSCHAPPY. Hak Erfacht dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan surat Gubernur Jendral Hindia Belanda no 43 dan 44 tanggal 10 Juli 1919 dan surat keputusan Direktur Binne Landdschap

Bester no A6/56/2,A6/15/12, dan A6/10/24 kepada Horisons & Crossfield, Ple, sebuah kongsi dagang dan pengelola perkebunan yang berpusat di London, Inggris, selama 50 tahun, dengan komoniti utama kapuk (kapas), kopi dan kakao . Di tingkat lokal dilakukan kesepakatan antara Horisons & Crossfield, Ple. dengan tiga kepala kawanua (distrik), yaitu karaeng Nanrang dari distrik Ujung Bulu, karaeng Nojeng dari distrik Bulukumba, karaeng Bapa Daeng Marasa dari distrik Kajang, keresidenan Bantaeng.

Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) I dilakukan pada tahun 1974 selama 30 tahun dan berlaku surut pada tahun 1968 berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Selatan. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Selatan no 18/HGU/III/1974, tanggal 25-10-1974, surat Bupati Bulukumba No. 92/DB/VIII, tanggal 22-06-1973 dan No. 147/DB/VIII, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 39/HGU/DA/1974 dengan nama PT. SULAWESI, dengan komoditi tanaman karet.

Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) II, dilakukan pada tahun 1997 berdasarkan surat kepala BPN no 12 tahun 1992 dan Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. III /HGU/ BPN/1997, dengan konsensi seluas 5.784.46 Ha, dengan nama PT. LONDON SUMATRA INDONESIA. Tbk.

Sejak tahun 1919 hingga tahun 1970 an, perusahaan PT. LONSUM tidak dapat menanam seluruh lahan HGU secara maksimal akibat situasi politik dalam

negeri yang tidak stabil dan pengaruh perang dunia ke II. Tetapi sejak pada tahun 1980 an, dimana situasi politik telah membaik dan ditunjang program pemerintah untuk mengembangkan ekonomi nasional, mulailah PT LONSUM mengembangkan penanaman karet pada lahan HGU yang selama ini terlantar. Untuk mempercepat pengembangan penanaman baru, maka oleh pihak manajemen PT LONSUM, PT SULAWESI dimekarkan menjadi dua kebun, yaitu PT Perkebunan Balombissie seluas 2.348 Ha dan PT Sulawesi Perkebunan Palangisang seluas lebih kurang 4000an ha yang didasarkan pada kesesuaian letak geografis.

Sejak permulaan abad ke 19, Horisons & Crossfield, Ple. memiliki kebun – kebun di Sumatera, Jawa dan Sulawesi dengan nama perusahaan yang berbeda – beda, misalnya di Sumatera Utara ada PT. London Sumatera Indonesia (paling luas), PT. Sibulan, PT Rambongsialang, di Jawa ada PT. Terbabsala dan PT. Kertasari serta di Sulawesi terdapat PT. Sulawesi. Untuk menyatukan visi dan misi, serta memperkuat kesatuan manajemen dalam menghadapi tantangan bisnis global, maka pada tahun 1989 dilakukan merger (amalgamasi) terhadap seluruh PT perkebunan yang ada dibawah bendera Horisons & Crossfield, Ple. dengan nama PT. LONDON SUMATRA INDONESIA yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Sejak itu seluruh kebun berubah nama menjadi PT. LONDON SUMATRA INDONESIA dan PT. Sulawesi Perkebunan Balombessie menjadi PT. LONDON SUMATRA INDONESIA, Perkebunan Balombessie.

1. Komoditas PT. Lonsum

Karet merupakan komoditas perkebunan PT. Lonsum yang sangat penting peranannya, selain sebagai sumber lapangan kerja, komoditas ini juga memberikan kontribusi yang signifikan sebagai salah satu sumber devisa non-migas, pemasok bahan baku karet dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah pengembangan karet.

Lonsum memiliki tujuh pabrik yang memproduksi sheet rubber dan crum rubber untuk penjualan domestic maupun ekspor. Saat ini Lonsm memiliki lahan perkebunan karet seluas 17.394 hektar, yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan, yang terdiri dari perkebunan inti dan plasma.

Tabel 4. Hasil produksi karet tahun 2012 sampai 2016

Tahun	Produksi karet
2012	1.987.000 Kg
2013	2.086.000 Kg
2014	2.279.000 Kg
2015	2.792.000 Kg
2016	2.947.000 Kg

Berdasarkan tabel diatas hasil produksi karet mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dari tahun 2012 ke tahun 2013 hasil produksi

karet meningkat sampai dengan 99.000 kg, tahun 2013 ke tahun 2014 hasil produksi karet meningkat sampai 193.000 kg, tahun 2014 ke tahun 2015 hasil produksi karet meningkat sampai 513.000 kg, dan tahun 2015 ke tahun 2016 hasil produksi karet meningkat sampai dengan 155.000 kg. Dari hasil peningkatan produksi karet diatas pada tahun 2014 ke tahun 2015 produksi karet mengalami peningkatan dengan baik.

Tabel 5. Tujuan eksport produksi karet

No	Benua	Negara	Kota
1	Amerika	USA	Norfolk
		USA	New Orleans
		USA	Los Angeles
		USA	Morehead City
		Kanada	Montreal
2	Eropa	Yunani	Thessalonika
		Italia	Le Havre
		Italia	Genoa
		Inggris	Southampton
3	Asia	Singapura	Shingapura
		China	China

Berdasarkan tabel diatas ada 7 negara tujuan eksport produksi karet yaitu USA, Kanada, Yunani, Italia, Inggris, Singapura, China. Dan 11 kota besar diantaranya Norfolk, New Orleans, Los Angeles, Morehead city, Montreal, Thessalonika, Le Havre, Genoa, Southhampton, Singapura, China, dan juga 3 Benua yaitu Amerika, Eropa dan Asia. Dari beberapa kota tujuan eksport produksi karet, kota yang terletak paling jauh yaitu Montreal yang berada di Negara Kanada.

Membangun kebun karet diperlukan teknologi budidaya karet yang mencakup beberapa kegiatan yaitu: syarat tumbuh tanaman karet, bahan tanaman atau bibit, pemeliharaan tanaman, pemupukan, pengendalian gulma dan penyadapan atau panen. Syarat tumbuh tanaman karet memerlukan kondisi-kondisi tertentu yang merupakan syarat hidupnya. Berikut beberapa hasil kutipan wawancara petani karet PT. Lonsum mengenai budidaya tanaman karet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail. T, salah satu petani karet PT. Lonsum Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sabtu 17 Juni pada pukul 07.30 di lokasi perkebunan karet PT. Lonsum.

Mengenai pengendalian gulma dalam pemeliharaan tanaman karet yaitu Areal pertanaman karet, baik tanaman belum menghasilkan maupun tanaman sudah menghasilkan harus bebas dari gulma seperti alang alang dan tumbuhan lain yang mengganggu tanaman karet sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Ramli Beddu, salah satu petani karet PT. Lonsum Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sabtu 17 Juni 2017 pukul 08.30 di perkebunan karet PT. Lonsum.

Mengenai program pemupukan untuk pemeliharaan tanaman karet yaitu selain pupuk dasar yang sudah diberikan pada saat penanaman, program pemupukan secara berkelanjutan pada tanaman karet harus dilakukan dengan dosis yang seimbang dua kali pemberian dalam setahun. Jadwal pemupukan pada tahap 1 yakni pada Januari/Februari dan pada tahap 2 yaitu Juni/Juli. Seminggu sebelum pemupukan, gawangan lebih dahulu digaru dan piringan tanaman dibersihkan. Pemberian SP-36 biasanya dilakukan dua minggu lebih dahulu dari Urea dan KCl. Sementara itu untuk tanaman kacang penutup tanah, diberikan pupuk RP sebanyak 200 kg/ha, yang pemberiannya dapat dilanjutkan sampai dengan tahun ke 2 apabila pertumbuhannya kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Agus salim nasution, Asisten 1 PT.

Lonsum Balombessie Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Selasa 20 Juni pukul 13.30 di kantor PT. Lonsum.

Mengenai syarat tumbuh tanaman karet ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya iklim, curah hujan, ketinggian tempat, angin dan tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kahar. S (Olle,) salah satu penyadap karet PT. Lonsum di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Selasa 20 Juni pukul 08.30 di perkebunan karet PT. Lonsum.

Mengenai penyadapan dilakukan dengan memotong kulit kayu dari kiri atas ke kanan bawah dengan menggunakan pisau sadap. Semakin dalam sadapan akan menghasilkan banyak lateks. Pada proses penyadapan perlu dilakukan pengirisan. Bentuk irisan berupa saluran kecil, melingkar batang arah miring ke bawah. Melalui saluran irisan ini akan mengalir lateks selama 1-2 jam. Sesudah itu lateks akan mengental. Lateks yang mengalir tersebut ditampung ke dalam mangkok yang digantungkan pada bagian bawah bidang sadap. Sesudah dilakukan sadapan, lateks mengalir lewat aluran pisau sadap tadi dan menetes tegak lurus ke bawah yang ditampung dengan wadah.

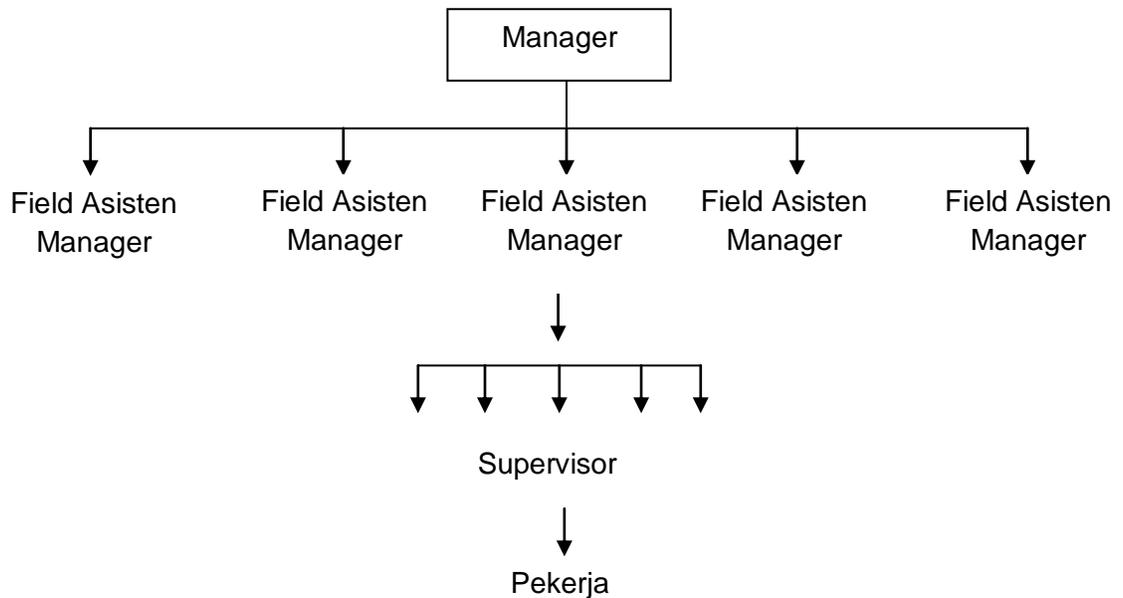
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sanneng, sebagai penyadap karet PT. Lonsum di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Selasa 20 Juni pukul 09.00 di perkebunan karet PT. Lonsum.

Mengenai waktu penyadapan yang baik adalah jam 5.00 – 7.30 pagi karena jumlah lateks yang keluar dan kecepatan aliran lateks berjalan dengan baik. Dan apabila penyadapan dilakukan pada siang hari jumlah lateks yang keluar itu sedikit dan aliran lateks berjalan kurang baik karena cepat kering.

2. Struktur Organisasi PT. Lonsum

PT Lonsum perkebunan Balombisse, memiliki lahan HGU seluas 2.348 Hektar dan plasma seluas 740 Ha. Sejak tahun 1957, tanaman kapuk, kopi, dan kakao mulai di konversi ke tanaman karet dan hingga sekarang telah 100 persen menjadi tanaman karet. Dari 2.348 hektar tanaman karet, seluas 1700 hektar berupa tanaman menghasilkan dan sisanya masih tanaman belum menghasilkan. Rata – rata produksi karet kering pertahun mencapai 1700 kg per hektar diatas rata – rata produksi karet nasional yang 1300 kg per hektar.

Untuk menggerakkan roda organisasi PT. Lonsum, Perkebunan Balombessie, dipimpin oleh seorang Manager, 5 orang Asisten Manager, 84 orang Supervisor, dan 577 orang pekerja (non Supervisor). Aktivitas pekerjaan sehari - hari adalah pemanenan (penyadapan) mendominasi aktivitas harian, pemeliharaan tanaman dan administrasi. Struktur organisasi PT. LONSUM, Perkebunan Balombessie dapat digambarkan sebagai berikut :



Struktur Organisasi Perkebunan Balombessi

a. Fungsi-Fungsi Personal Dalam Struktur Organisasi

1. Manajer

Manajer adalah pimpinan tertinggi dalam sebuah unit kebun. Seorang manajer mempunyai tanggung jawab untuk menggerakkan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan perseroan. Fungsi manajer adalah mengendalikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia, tanaman, keuangan, transportasi, dan administrasi. Keputusan untuk menggerakkan faktor-faktor produksi menjadi tugas utama seorang manajer.

2. Field/Office Asisten Manajer

Field Asisten Manajer adalah para pembantu Manajer untuk mengimplementasikan seluruh keputusan-keputusan manajer di lapangan. Mereka bertanggung jawab atas keberhasilan seluruh program yang sudah diputuskan Manajer dan memberi laporan harian atas kemajuan-kemajuan program dilapangan.

Office Asisten Manajer bertanggung jawab atas seluruh administrasi kebun berupa laporan-laporan keuangan, akuntansi, purchasing (pembelian) dan produksi. Seluruh laporan-laporan ini sudah harus masuk ke meja manajer tiap hari.

3. Supervisor

Supervisor adalah penyelia atau pengawas yang menjadi pembantu Field/Office Asisten. Tugas supervisor adalah mengawasi seluruh pekerjaan para pekerja agar tidak menyimpang dari standar operasional yang sudah ditentukan. Para supervisor juga menjadi penghubung utama untuk menjembatani kepentingan perusahaan dengan karyawan dan kepentingan karyawan terhadap perusahaan.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana bangunan: Kantor sentral ,kantor divisi, gudang , bengkel, poliklinik, aula serbaguna, rumah pintar, perpustakaan, pabrik karet, rumah dinas, masjid, dapur, pos satpam, dan lapangan tennis.

Sarana kesehatan: Poliklinik PT.PP LONSUM dilengkapi alat-alat kesehatan :
Seperti peralatan tindakan medis

- a. Peralatan medis
- b. Sarana pemeriksaan fisik sederhana
- c. Sarana obat-obatan lengkap

Prasarana Mobilitas: Prasarana ini sebagai penunjang mobilitas untuk karyawan, selain itu prasarana ini juga mengangkut anak-anak sekolah. PT LONSUM memiliki kendaraan dinas antara lain mobil bus ,mobil tangki untuk mengangkut karet dan mobil yg biasa disebut mobil kol untuk mengantar – jemput anak-anak sekolah.

c. Visi dan Misi Perusahaan

Visi perusahaan adalah sesuatu yang penting, karena visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Secara singkat dapat dinyatakan, visi adalah pernyataan *want to be* dari organisasi atau perusahaan. Perusahaan membutuhkan visi yang dapat digunakan sebagai:

1. Penyatuan tujuan, arah dan sasaran perusahaan.
2. Dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya.
3. Pembentuk dan pembangun budaya perusahaan.

Visi dari LONSUM adalah *to be the leading 3C (crops, cost, conditions) and R&D driven sustainable agribusiness* → menjadi perusahaan agribisnis terkemuka

yang berkelanjutan dalam hal tanaman lingkungan (3C) dan berbasis penelitian dan pengembangan.

Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Tujuan dari pernyataan misi adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder, di dalam maupun luar organisasi tentang alasan pendirian perusahaan dan ke arah mana perusahaan akan menuju. Oleh karena itu, rangkaian kalimat dalam misi sebaiknya dinyatakan dalam suatu bahasa dan komitmen yang dapat dimengerti dan dirasakan relevansinya oleh semua pihak yang terkait.

Lonsum memiliki Misi: *to add value for millions in agribusiness* (menambah nilai bagi jutaan orang dibidang agri bisnis).

Adapun tujuan pokok perusahaan yaitu: Integritas yaitu jujur dan bertanggung jawab, kerja sama yaitu saling menghormati dan peduli dan Unggul yaitu disiplin dan perbaikan terus menerus.

C. Kerjasama Pemerintah Daerah dan PT. Lonsum dalam Pemberdayaan Petani Karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

1. Indikator kerjasama Pemerintah Daerah dan PT. Lonsum dalam pemberdayaan petani

a. Kebijakan

Dukungan kebijakan pemerintah daerah merupakan faktor strategis yang sangat dibutuhkan perannya dalam menciptakan kondisi faktor strategis lain ke posisi yang dapat memberikan dukungan secara optimal bagi terlaksananya pembangunan perkebunan karet berkelanjutan. Dukungan kebijakan yang sangat diperlukan terutama dalam mempersiapkan tenaga pembina agar menjadi tenaga yang profesional, penyediaan dana untuk penyuluhan dan pembinaan petani, penyediaan kredit bunga bersubsidi untuk modal kerja petani serta memperbaiki berbagai infrastruktur dan prasarana penunjang lainnya seperti jalan, jembatan, terminal dan pelabuhan.

Peranan pemerintah daerah juga secara aktif berperan sebagai fasilitator untuk menetapkan kebijakan yang mendukung program pengembangan komoditas. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.

Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan program pemerintah yang berfokus pada proses pemberdayaan untuk mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi dan kemampuannya agar dapat mandiri, dan salah satu aspek utama dalam memastikan program ini memenuhi tujuan adalah fasilitator masyarakat. Untuk menjadi mitra yang kompeten bagi masyarakat, maka fasilitator masyarakat harus memiliki kompetensi dasar dari pekerjaannya, guna menjamin berjalannya suatu program.

Keberhasilan seorang fasilitator selain ditentukan oleh kemampuan profesional, intelektual juga bagaimana fasilitator mampu mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dengan peserta pelatihan.

Fasilitator harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Empathy, yaitu berpikir dan mampu merasakan seperti para peserta.
2. Wajar, yaitu bersikap jujur, terus terang, konsisten, terbuka, mencerminkan peranan diri yang sebenarnya.
3. Respek, yaitu mempunyai pandangan positif terhadap setiap ucapan, ungkapan respon dari peserta. Menghargai perasaan, pengalaman dan pendapat peserta.
4. Komitmen, yaitu mengadirkan diri secara penuh dan tanggung jawab.
5. Membuka diri, yaitu menerima keberadaan dan pendapat orang lain tanpa menilai dengan ukuran konsep dan pengalaman sendiri.

6. Tidak menjadi ahli, yaitu tidak terpancing untuk menjawab sendiri segala pertanyaan.

Menurut pendapat Bapak Ir. AB. Iskandar, M. Si Kabid Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba Senin 5 juni 2017 di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba.

Mengenai peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu pemerintah yang akan memfasilitasi program-program yang akan diadakan dalam upaya perbaikan kualitas dan kuantitas masyarakat petani.

b. Pengetahuan

Salah satu indikator kerjasama Pemerintah dan PT. Lonsum dalam kegiatan pemberdayaan petani karet yaitu memberikan pengetahuan dengan cara penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan pertanian adalah pemberdayaan petani melalui kegiatan nonformal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat tercapai.

Kinerja penyuluh pertanian ditentukan pada tingkat pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi penyuluh pertanian dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Pada umumnya, kinerja penyuluh pertanian didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya yang diuraikan secara komprehensif pada uraian macam-macam tugas yang akan dilakukan. Kinerja penyuluh pertanian secara garis besarnya dapat dilihat pada aspek persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan

penyuluhan pertanian dan pengembangan profesi penyuluh pertanian. Selain itu aspek kepemimpinan, komunikasi, kemitraan usaha dan desiminasi teknologi serta penguasaan terhadap bidang teknis keahlian juga sangat menentukan tingkat keberhasilan seorang penyuluh.

Pengembangan penyuluhan pertanian dan profesi merupakan tindak lanjut dari evaluasi dan pelaporan. Agar kegiatan penyuluhan terus mengikuti perkembangan zaman dan dinamika kehidupan petani, maka seorang penyuluh dituntut untuk terus melakukan proses pembelajaran terutama dalam aspek pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan pertanian dan metode atau sistem kerja penyuluhan pertanian.

Peran penyuluhan pada kegiatan pemberdayaan petani karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa dianggap sebagai pemberian teori pemberdayaan kepada petani karet untuk menambah pengetahuan dan dilanjutkan pada kegiatan pelatihan sebagai bentuk dari teori. Pelatihan yang diberikan kepada petani karet yaitu penyuluh pertanian mulai dari pembibitan sampai pasca panen.

Cara-cara penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan yaitu:

1. Metode sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau tranfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.
2. Metode demonstrasi terbagi atas tiga cara adapun sebagai berikut :

- Demonstrasi cara : memperlihatkan secara singkat kepada petani karet bagaimana melakukan suatu cara kerja baru atau lama yang telah disempurnakan misalnya pembibitan, pengolahan tanah, pemupukan, dsb.
- Demonstrasi hasil : menunjukkan kepada orang-orang hasil suatu cara kerja baru atau lama yang disempurnakan.
- Gabungan demonstrasi cara dan hasil : dalam kegiatan praktek dilapangan memang cara ini yang sering dilakukan dalam kegiatan penyuluhan.

Metode tersebut disesuaikan atau diadaptasikan dengan topik belajar atau berlatih dan ditunjukkan agar peserta didik atau peserta pelatihan dapat melakukan suatu kegiatan setelah didemonstrasikan oleh pelatih atau penyuluh pertanian. Selain memerlukan tenaga yang cukup juga ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu (1) lokasi demonstrasi harus sesuai dengan kondisi nyata secara teknis menunjang, misalnya : praktek penanaman karet, (2) pemberi pelatihan (demonstrator) harus dipilih seorang yang memiliki keterampilan teknis yang memadai serta seorang yang bergiat pada bidangnya (profesional), praktisi yang berhasil, (3) demonstrasi harus berhasil dan apabila gagal akan berakibat pada tingkat kepercayaan pada penyuluh pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amran Nur, Petani karet PT. Lonsum Balombessie Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Rabu 14 juni 2017 di perkebunan karet Lonsum.

Mengenai Penyuluhan dan Pelatihan yang diadakan pemerintah dan PT. Lonsum dalam program pemberdayaan petani karet sangat membantu petani

dalam hal peningkatan kapasitas petani dan peningkatan hasil tanaman karet dengan tujuan mensejahterakan petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Petani karet PT. Lonsum Balombessie Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Rabu 14 juni 2017 di perkebunan karet Lonsum.

Setelah adanya penyuluhan pertanian ini, petani karet lebih mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mengetahui teknologi pertanian. Setelah adanya penyuluhan hasil produksi karet lebih baik daripada sebelumnya dan juga petani karet semakin berdaya.

c. Sikap

Salah satu indikator kerjasama PT. Lonsum dalam pemberdayaan masyarakat petani karet yaitu dengan adanya tanggung jawab sosial sebagai sikap dari PT. Lonsum. PT. Lonsum sepenuhnya menyadari tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat di mana PT. Lonsum menjalankan usahanya. PT. Lonsum senantiasa mengutamakan integrasi prioritas kemasyarakatan dan lingkungannya ke dalam operasi bisnisnya sehari-hari. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa keberlanjutan usaha PT. Lonsum sangat tergantung pada terciptanya hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

Program-program Tanggung Jawab Sosial PT. Lonsum dikembangkan berlandaskan prinsip-prinsip triple-bottom-line, yang mengedepankan keseimbangan antara kinerja keuangan, masyarakat dan lingkungan. Program-program tersebut meliputi empat area utama berikut: pengelolaan lingkungan, praktik ketenagakerjaan,

keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan tanggung jawab produk. Kegiatan pemberdayaan sosial dan kemasyarakatan PT. Lonsum dibagi ke dalam empat bagian berikut.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ir. Osten Panjaitan sebagai Manager PT. Lonsum Balombessie Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Senin 19 Juni pukul 10.30 di ruangan Manager PT. Lonsum Balombessie.

Mengenai sumber daya manusia, PT. Lonsum menyadari bahwa bidang pendidikan merupakan faktor kunci dalam membangun SDM. Di bidang tersebut, PT. Lonsum terus memberikan bantuan ke masyarakat sekitar area perkebunan. Setiap tahun, PT. Lonsum Peduli menawarkan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tinggal di sekitar area perkebunan PT. Lonsum. Melalui program bantuan tersebut, PT. Lonsum berupaya membantu anak-anak tersebut untuk meraih potensinya. Guna membantu peningkatan proses belajar, secara rutin Lonsum menyelenggarakan program pengembangan kurikulum, serta sesi-sesi seminar dan pelatihan yang diikuti oleh para guru dari sekolah-sekolah di sekitar area perkebunan. PT. Lonsum juga membantu merekrut guru-guru bantu untuk berkarya di sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga guru, serta terus memberikan bantuan honorarium untuk tenaga guru honorer di sekitar area perkebunan. Di tahun 2014, PT. Lonsum turut berpartisipasi dalam pembangunan tiga unit sekolah di Kabupaten Bulukumba. PT. Lonsum juga memberikan dukungan pada perbaikan berbagai fasilitas belajar serta memberikan bantuan peralatan pendidikan dalam bentuk peralatan musik dan peralatan olahraga. Bekerjasama dengan IHF (Indonesia Heritage Foundation) Jakarta, pada tahun 2014 PT. Lonsum menyelenggarakan program Pelatihan Guru Karakter tingkat Guru SD di Kabupaten Bulukumba. Sebanyak 42 guru SD yang berasal dari sekolah yang berada dilokasi perkebunan PT. Lonsum di Kabupaten Bulukumba ikut dalam pelatihan tersebut. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan cara membangun anak berkarakter serta penerapan pendekatan pendidikan holistik berbasis karakter. Di tahun 2015 PT. Lonsum bekerjasama dengan IndoAgri Sehati menyelenggarakan pelatihan Master Of

Trainee (MOT program) bagi para bidan, perawat dan kader yang bertugas di klinik dan posyandu di sekitar area perkebunan Lonsum. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para peserta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Partisipasi Aktif dalam Kegiatan Komunitas

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ir. Osten Panjaitan sebagai Manager PT. Lonsum Balombessie Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Senin 19 Juni di ruangan Manager PT. Lonsum Balombessie.

Melalui berbagai program kegiatan, Lonsum berupaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar kegiatan usahanya. Beberapa program yang dilaksanakan di tahun 2015 meliputi: Pembangunan fasilitas air bersih dan perbaikan jalan di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dukungan bagi kegiatan olahraga dan kepemudaan, sebagai sponsor kompetisi olahraga serta pembangunan sarana olahraga bagi komunitas setempat, pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah, serta pemberian bantuan untuk pesantren dan sumbangan rutin bagi anak-anak yatim piatu, dan dukungan pada kegiatan keagamaan seperti MTQ, yang diselenggarakan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

3. Menjaga Kelestarian Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara Ir. Osten Panjaitan sebagai Manager PT. Lonsum Balombessie Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Senin 19 Juni di ruangan Manager PT. Lonsum Balombessie.

Mengenai kelestarian lingkungan PT. Lonsum sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, kegiatan pemeliharaan kelestarian lingkungan merupakan kegiatan yang penting bagi keberlangsungan usaha PT. Lonsum.

4. Kegiatan Solidaritas Kemanusiaan

Berdasarkan hasil wawancara Ir. Osten Panjaitan sebagai Manager PT. Lonsum Balombessie Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Senin 19 Juni di ruangan Manager PT. Lonsum Balombessie.

Mengenai kegiatan solidaritas kemanusiaan Di tahun 2016, Lonsum bersama Indofood Group bekerjasama dengan TNI AD menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis, operasi katarak, pengobatan umum, pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita serta sunatan massal. Seperti tahun-tahun sebelumnya, PT. Lonsum juga menyelenggarakan aksi sosial donor darah di wilayah operasional PT. Lonsum di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, yang berhasil mengumpulkan lebih dari 300 kantong darah. Untuk pencapaian tersebut, kantor cabang PT. Lonsum di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba berhasil memperoleh penghargaan sebagai perusahaan pendonor terbanyak dan konsisten pelaksanaannya dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

d. Motivasi

Salah satu motivasi yang dilakukan PT. Lonsum untuk meningkatkan hasil produksi tanaman karet yaitu dengan memberikan insentif kepada petani karet. Dalam memberikan insentif, PT. Lonsum mengetahui kebutuhan petani karet. Dengan adanya kebutuhan, petani karet akan termotivasi melakukan pekerjaan dan berarti dapat membantu dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Apabila petani karet merasa kebutuhannya dapat terpenuhi dengan melakukan suatu pekerjaan, maka ia akan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik dan secara otomatis berarti

produktivitasnya meningkat. Pada hakekatnya insentif dapat mendorong petani bekerja lebih baik dengan memanfaatkan unsur-unsur kerja yang lebih optimal, karena terdorong keinginan untuk memperoleh insentif yang lebih baik dan tinggi. Hal ini dapat dicapai bila petani karet memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam PT. Lonsum.

2. Pemberdayaan Petani Karet

a. Kelembagaan petani karet

Kelembagaan petani karet adalah sesuatu yang berada diatas petani, sedangkan organisasi berada dilevel petani karet. Upaya meningkatkan daya saing petani karet salah satunya adalah pengembangan kelembagaan pertanian, pemberdayaan, pemantapan dan peningkatan kemampuan petani karet.

Organisasi atau kelembagaan petani karet PT. Lonsum diakui sangat penting untuk meningkatkan perkebunan karet PT. lonsum, baik di negara industri maupun negara berkembang seperti indonesia. Namun kenyataan kecenderungan masih lemahnya organisasi petani di negara berkembang, serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan organisasi atau kelembagaan pada masyarakat petani. Intervensi yang terlalu besar dari pemerintah atau politisi seringkali menyebabkan organisasi itu bekerja bukan untuk petani tetapi melayani kepentingan pemerintah atau para pengelolanya.

Dalam meningkatkan pembangunan perkebunan karet PT. Lonsum, peranan kelembagaan petani karet sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan berbagai

program yang sedang dan yang akan dilaksanakan karena lembaga petani inilah pada dasarnya pelaku utama pembangunan perkebunan karet.

Serikat Pekerja PT. Lonsum adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh dalam PT. Lonsum, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Hubungan antara pekerja dengan PT. Lonsum disebut hubungan industrial adalah hubungan kerja yang didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam suatu hubungan kerja. Hubungan Industrial juga adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur Perusahaan, Pekerja dan Pemerintah.

Sesuai dengan pengertian dan penjelasan dari Serikat Pekerja itu sendiri ditegaskan bahwa tujuan dari pembentukan Serikat Pekerja adalah guna memperjuangkan dan membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga maka agar tujuannya dapat tercapai, organisasi Serikat Pekerja harus menjalankan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Serikat Pekerja PT. Lonsum

1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja sama dan penyelesaian permasalahan perselisihan industrial.

2. Sebagai wakil pekerja /buruh dalam lembaga kerjasama sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya.
3. Sebagai sarana meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dan memperjuangkan hak dan kepentingan anggota.
5. Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokkan pekarja/ buruh sesuai dengan peraturan perundan-undanganyang berlaku.
6. Sebagai wakil pekerja /buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syukur, wakil ketua SPSI PT.

Lonsum Balombessie Selasa 13 juni 2017 pada pukul 09.30 di rumahnya

Mengenai keberadaan serikat pekerja di PT. Lonsum itu sangat berpengaruh dalam memperjuangkan hah-hak pekerja salah satunya dalam hal penetapan konpensasi, serikat pekerja juga merupakan wadah dalam menampung setiap keluhan dan anspirasi yang disampaikan pekerja dalam perusahaan. Jadi dengan keberadaan serikat pekerja PT. Lonsum itu sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

D. Faktor Pemberdayaan

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong pemberdayaan adalah faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam faktor pendorong suatu kegiatan pemberdayaan itu tidak lepas dari pribadi masyarakat yang akan diberdayakan, lingkungan dan partisipasi pemerintah.

Faktor pendorong pemberdayaan petani karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sangat dipengaruhi oleh motivasi petani sebagai subjek dan peran pemerintah sebagai fasilitator.

a. Motivasi Petani

Motivasi petani perlu ditumbuhkan untuk mendorong peran serta secara aktif dalam pengelolaan dan keberhasilan suatu program di bidang pertanian. Untuk itu upaya pelibatan petani dan pengembangan kegiatan yang dilandasi oleh kepentingan masyarakat tani. Pelaksananya perlu diintegrasikan dengan aspek aspek yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Penyeimbangan kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi. Dengan adanya motivasi dari pelaku pemberdayaan dalam hal ini adalah petani karet yang mempunyai keinginan dan tekad dalam perbaikan taraf hidupnya.

Salah satu faktor pendorong dalam pemberdayaan adalah peran serta pemerintah dan PT. Lonsom yang dalam hal ini sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas kepada petani serta dukungan dalam suatu kegiatan pemberdayaan, seperti penyuluhan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk peningkatan hasil produksi tanaman karet.

b. Partisipasi pemerintah

Dengan adanya partisipasi pemerintah di Kabupaten Bulukumba dan partisipasi masyarakat petani dalam mengisi kegiatan produktif dengan tujuan adanya

kerjasama antara pemerintah dan PT. Lonsum dalam pemberdayaan masyarakat petani serta komunikasi yang terjalin dengan aktif mampu menciptakan gagasan-gagasan baru dalam kegiatan pemberdayaan.

Untuk itu kelembagaan kelembagaan petani perlu ditingkatkan secara terus menerus yang melibatkan peran pemerintah sebagai strategi pemberdayaan petani karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu sentra penghasil karet dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani karet.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat suatu program pemberdayaan adalah faktor-faktor yang menghambat jalannya program, sehingga perlu dikurangi atau diantisipasi agar tidak mengganggu program program pemberdayaan petani karet. Banyak program pemberdayaan yang berhasil dan mencapai tujuan yang di tetapkan, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari system sosial.

Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terhambatnya program pemberdayaan petani karet.

a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang terlambat

Jika suatu masyarakat kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat tersebut menjadi lambat. Hal ini disebabkan mereka kurang atau belum menerima informasi tentang kemajuan masyarakat lain. Disamping itu penjajahan juga dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan IPTEK pada suatu masyarakat.

b. Kurangnya kesadaran petani

Efektifnya aturan dalam badan pengelolaan organisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kesadaran petani untuk memperoleh atau melaksanakan suatu program pertanian. Namun hal tersebut yang kurang terlihat, masih rendahnya partisipasi dalam memperoleh pengetahuan baru yang disebut adopsi inovasi petani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian mengenai Pemberdayaan Petani Karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerjasama Pemerintah dan PT. Lonsum dalam Pemberdayaan Petani Karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sangat penting, dimana Pemerintah dan PT. Lonsum memfasilitasi petani dan mengadakan suatu program pemberdayaan yang dibantu oleh penyuluh pertanian dan lembaga petani untuk meningkatkan kapasitas petani dan meningkatkan hasil tanaman karet.
2. Dalam melaksanakan suatu kegiatan pemberdayaan ada yang disebut faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi kegiatan pemberdayaan. Faktor penghambat pemberdayaan petani karet yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang terlambat, dan kurangnya kesadaran petani. Sedangkan faktor pendorong kegiatan pemberdayaan yaitu motivasi petani dan partisipasi pemerintah.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya pemerintah dan PT. Lonsum menambah program pemberdayaan petani karet.
2. Diharapkan dari penelitian ini, bahwa semua hambatan yang ada dan yang pernah terjadi dapat menjadi pembelajaran untuk kemajuan dan pengembangan perusahaan di masa selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersono, 1989. Kebijakan Publik Yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Pemberantasan Kemiskinan, Erlangga, Jakarta.
- Anwar, C., 2001. Manajemen dan Teknologi Budidaya Karet. Pusat Penelitian Karet. Medan
- Arifin, Bustanul. 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Kompas, Jakarta
- Aidi dan Daslin., 1995. Pengelolaan Bahan Tanam Karet. Pusat Penelitian Karet. Balai Penelitian Sembawa. Palembang.
- Davis (dalam Dewi, tahun 2006), “Psychologymania”, indikator-indikator kerjasama, diakses dari: <http://www.psychologimania.com/2013/02/indikator-indikator-kerjasama.html>.
- Danardi, 2000. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat. Bina Aksara, Jakarta.
- Deptan., 2006. Basis Data Statistik Pertanian (<http://www.database.deptan.go.id>). Diakses tanggal 5 Mei 2009.
[Http://id.wikipedia.org/wiki/Para_\(pohon\)](Http://id.wikipedia.org/wiki/Para_(pohon)), diakses 2 Maret 2010.
- Inu Kencana Syafiie, 2011. Ilmu Pemerintahan. Kartika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cet. ke-3
- Mubyarto, 2000. Pemberdayaan Masyarakat. Bina Aksara, Jakarta.
- Maryadi. 2005. Manajemen Agrobisnis Karet. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nazaruddin, dkk, 1992. Budidaya dan Pengolahan Karet. Strategi Tahun 2000. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Nazaruddin dan F.B. Paimin., 1998. Karet. Penebar Swadaya. Jakarta.

Pranaka, 1996. Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Erlangga, Jakarta.

Prof. Sarbini, 2004. Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Sulistiyani, A.T, 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gajah Media, Yogyakarta.

Setiawan dan Handoko, 2005. Petunjuk Lengkap Budidaya Karet. Agromedia Pustaka. Jakarta.

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Cetakan Keempat, Penerbit :Alfabeta, Bandung.

Santosa. 2007., Karet. (<http://id.wikipedia.org/wiki/karet>). Diakses tanggal 21 Maret 2009.

L
A
M
P
I
R
A
N



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : Alam Hadiano
Nomor Stambuk : 10564 01695 12
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Kerjasama Pemerintah Daerah dan PT Lonsum dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Karet di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si(Ketua)	8-1-2018	
2	Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd	05/01/2018	
3	Dr. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si	09/01/2018	
4	Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si	05/01/2018	

Makassar, 2018
Mengetahui :
Wakil Dekan I .

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

Nomor : 0580/FSP/A.1-VIII/V/1438 H/2017 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Alam Haditarto
S t a m b u k : 10564 01695 12
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
Judul Skripsi : *"Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Lonsum dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya

Yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 19 Mei 2017



Dekan,
Ob. Pembantu Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084 366



LONSUM

IndoAgri

No. 139/HRD/TR/EXV/2017

Medan, 31 Mei 2017

Kepada Yth,
Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)
Pemerintah Kabupaten Bulukumba
Jalan. Durian Nomor. 2
Bulukumba – Kode Pos 92511

HAL : IJIN RISET

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara No.308/Balitbangda/V/2017, tanggal 24 Mei 2017 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menerima mahasiswa / mahasiswa di bawah ini untuk melaksanakan Riset di perusahaan kami PT. PP. London Sumatra Indonesia,Tbk (Balombessie Estate) mulai tanggal 1 s/d 23 Juni 2017.

Nama : Alam Haditarto
Nomor Pokok : 10564 01695 12
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : "Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Lonsum dalam Peningkatan Pembedayaan Masyarakat Petani Karet di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba".

Perusahaan tidak memberikan fasilitas seperti penginapan, makan, transport, dan lain sebagainya, hal tersebut menjadi tanggungan yang bersangkutan.

Surat keterangan Riset dan administrasi lainnya hanya dikeluarkan oleh Human Resources Departemen (HRD) dan akan diberikan setelah peserta memberikan laporan kegiatan Riset kepada Departemen terkait dan HRD dalam bentuk *hard copy & soft copy*.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

P.T. P.P. LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk.



cc: - Balombessie Estate
- File

PT. P.P. LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk.
Jl. Ahmad Yani No.2
Medan 20111
Sumatera Utara - Indonesia
T. +6261 453 2200
F. +6261 451 9196
www.londonsumatra.com

a subsidiary of
Indofood
INDOFOOD GROUP



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Alamat : Jalan Durian Nomor 2 Bulukumba, Telp. (0413) 81102 Kode Pos 92511

Bulukumba, 24 Mei 2017

Nomor : 308/Balitbangda/V/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan PT. Lonsum Tbk
Kab. Bulukumba
di
Bulukumba

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Unismuh Makassar, Nomor:902/Izn-5C.4/VIII/V/37/2017, tanggal 17 Mei 2017, perihal Izin Penelitian maka yang tersebut di bawah ini:

Nama : ALAM HADITARTO
Nomor Stambuk : 10564 01695 12
Fakultas : Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Makassar

Bermaksud melakukan penelitian/pengambilan data di PT. Lonsum Tbk Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyelesaian tugas akhir (Skripsi) dengan judul "KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PT. LONSUM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KARET DI KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA" yang akan berlangsung pada tanggal 24 Mei s.d. 20 Juli 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan,
Kabid Sosial, Ekonomi & Pemerintahan
u.b.
Kasubbid Penyelenggaraan Pemerintahan
Dan Pengkajian Peraturan


AHMAD RIZALDY IHSAN, SE., M.Si
Pangkat Pembina
NIP. 19750723 200003 1 006

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Bulukumba;

RIWAYAT HIDUP



Alam Haditarto. Lahir di Bulukumba pada tanggal 25 Maret 1992, dari pasangan Ayahanda Sadaruddin dan Ibunda Salwiah. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 1997 di SD Negeri 210 Bontominasa dan tamat pada tahun 2003, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Kajang dan tamat pada tahun 2006, selanjutnya pada tahun yang sama melanjutkan ke Madrasa Alyah Negeri 1 Tanete dan dinyatakan tidak lulus dan kemudian pada tahun 2010 mengikuti ujian Paket C di Kabupaten Bulukumba. Pada tahun 2012 penulis mendaftar di Universitas Muhammadiyah Makassar dan diterima di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Pemerintahan.